



Menemukenali Konflik Potensial dan Aktual :

Analisis Sementara Atas Faktor-faktor Politik dan Sosial

Oleh : Amir Santoso

Kondisi Faktual

Menjelang pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi di bulan Mei 1998, telah terjadi kerusuhan massal bermotif rasial terutama di Jakarta dan di beberapa kota besar di Indonesia dengan korban ratusan jiwa. Setelah itu sejak terjadinya pergantian pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 hingga saat ini telah terjadi eskalasi berbagai kerusuhan sosial yang menjurus ke anarki, baik berupa konflik horisontal (antar golongan) maupun konflik vertikal (melawan aparat keamanan). Kerusuhan dan anarki tersebut terjadi di berbagai daerah dan dalam berbagai bentuk. Pada mulanya, di tahun 1998 merebak pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet di daerah Banyuwangi dan Jember. Puluhan "dukun santet" yang beberapa diantaranya ternyata kiyai dan ulama lokal ikut menjadi korban setelah dikeroyok dan dibunuh secara beramai-ramai.

Tidak berapa lama kemudian pecah peristiwa Situbondo di mana beberapa gereja telah dirusak dan dibakar oleh penduduk Muslim setempat. Di Sanggau-Ledo (Kalimantan Barat) terjadi semacam "perang suku" antara suku Madura yang merupakan pendatang di sana dengan orang-orang Dayak (penduduk asli). Menyusul kemudian peristiwa Sambas yang merupakan pengulangan dari peristiwa Sanggau-Ledo tetapi berskala lebih luas karena pertikaian antar suku tersebut



Penyebab utama dari semua kerusuhan yang melanda di berbagai daerah sejak lahirnya Orde Reformasi dua tahun lalu adalah faktor politik yaitu tidak adanya pemimpin yang disegani yang menyebabkan lemahnya pemerintah pusat.

melibatkan lebih banyak suku yaitu suku Madura melawan gabungan suku Dayak dan Suku Melayu. Hingga saat ini masih ratusan pengungsi suku Madura yang berada di penampungan di Pulau Madura dan di Pontianak dengan kondisi yang memprihatinkan.

Di Ambon meletus pertikaian antara umat Islam dan umat Nasrani diawali dengan serbuan pada hari raya Idul Fitri 1999. Pertikaian ini kemudian meluas ke berbagai daerah di Maluku seperti di Pulau Seram dan belum mampu dihentikan hingga saat ini. Konflik yang bermotif SARA juga meletus di Poso (Sulawesi). Dalam pertikaian SARA tersebut telah jatuh korban ratusan orang. Di Jakarta, unjuk rasa menuntut pengadilan bagi mantan Presiden Suharto terus berlangsung bersamaan dengan unjuk rasa buruh baik di depan kantor Departemen Tenaga Kerja maupun di pabrik masing-masing dan unjuk rasa tukang becak yang selalu memacetkan jalan dan kadang-kadang terjadi pembakaran kendaraan termasuk kendaraan militer.



Understanding Potential and Actual Conflicts:

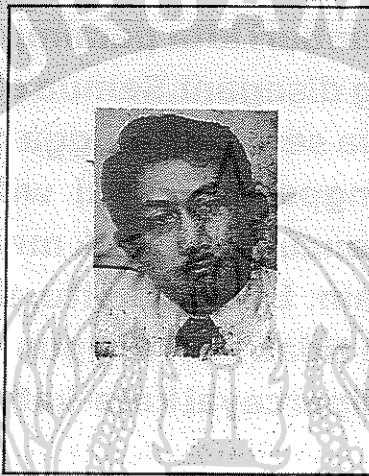
An Interim Analysis of Political and Social Factors

By: Amir Santoso

F actual conditions During the transfer of power from the New Order to the Reform Order in May 1998, racially-motivated mass riots took place in Jakarta and in some large Indonesian cities causing hundreds of victims to lose their lives. Then, from the change of government on 21 May 1998 to now there has been an escalation of social riots tending to anarchy, both horizontal conflicts (between groups) and vertical conflicts (against the security forces). These riots and anarchy happened in various areas in various forms. Initially, in 1998 there was the killing of people considered to be "dukun santet" (sorcerers) in the Banyuwangi and Jember regions. Dozens of dukun santet, some of whom were also local kiyai (Islamic teachers) and ulama (Islamic leaders) became victims after being attacked and killed by mobs.

Not long after the Situbondo case broke out in which some churches were attacked and burned by local Muslims. In Sanggau-Lado in Kalimantan Barat there was a sort of "tribal war" between migrants from Madura and local Dayaks. This was followed by the Sambas riots, which resembled the Sanggau-Lado conflicts but on a larger scale as they involved more tribes with Madurese being opposed by Dayaks and Malays. Up to now there are still hundreds of Madurese in camps in Madura island and Pontianak in alarming conditions.

In Ambon there exploded conflict



between Muslim and Christian communities starting with an attack on Idul Fitri day 1999. This conflict later spread to various areas in Maluku like Seram island and has not yet been stopped. Conflicts based on SARA (suku, agama, ras, antargolongan- tribe, religion, race and social group) also broke out in Poso, Sulawesi. In these SARA conflicts hundreds of people have been killed. In Jakarta demonstrators demanding justice for former President Suharto have continued along with labour demonstrations both at the Ministry of Manpower and at various factories, as well as demonstrations by becak drivers who always obstruct traffic, while sometimes people burn vehicles, including military vehicles.

In Jakarta and its suburbs as well as in a few corners of Java criminals both major and minor have been burned alive after being captured by residents. In June five thieves were

burned alive after stealing on a bus in Kampung Rambutan, Jakarta. Medan was shaken by a bomb which exploded in a church and some bombs were placed in other churches but failed to explode. In Bali, normally calm, there were social disturbances such as the burning of buildings and felling of trees in some streets in Denpasar and other regencies after Megawati was defeated by Abdurrahman Wahid in the selection of the president by the MPR in 1999.

Long before these social explosions in various parts of Indonesia, Aceh and Irian Jaya showed the danger of national disintegration. The basic cause of the Irian Jaya and Aceh cases can be seen as separatism. But seen from the point of view of the number of victims the Aceh and Irian Jaya cases can be seen as a form of anarchy. GAM in Aceh has shown the potential for armed threat and various disturbances and killings both against civilians and the security apparatus. In Irian Jaya some leaders have mobilised their supporters to arrange the Papuan People's Congress in an attempt to break away from the United Republic of Indonesia. Although they stated that they will not undertake armed struggle, in some incidents there have been injured and dead people both among civilians and among the security apparatus.

Causes of these social conflicts
Political factors.

Indeed there is no single factor



Di Jakarta pula dan beberapa daerah pinggiran serta di berbagai pelosok Pulau Jawa terjadi pembakaran hidup-hidup para kriminal kecil dan besar yang tertangkap oleh penduduk. Yang terjadi di bulan Juni yang lalu adalah pembakaran hidup-hidup lima penodong yang tertangkap ketika menodong di kendaraan umum di Kampung Rambutan, Jakarta.

Kota Medan digoncang bom ketika sebuah gereja diledakkan dan beberapa bom yang ditanam di gereja lain tidak meledak. Di Bali yang biasanya tenteram telah terjadi kerusuhan sosial berupa perusakan bangunan dan penumbangan pohon di beberapa ruas jalan di Denpasar dan di kabupaten lainnya setelah Megawati dikalahkan oleh Abdurrahman Wachid dalam pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999.

Jauh sebelum kerusuhan sosial meledak di berbagai tempat di Indonesia, Aceh dan Irian Jaya telah memperlihatkan bahaya disintegrasi nasional. Sebab pokok dari kasus Aceh dan Irian Jaya memang tidak bisa dimasukkan kedalam kategori kerusuhan sosial, melainkan sebagai upaya separatistis. Namun dilihat dari segi korban jiwa yang jatuh, kasus Aceh dan Irian Jaya bisa dianggap sebagai salah satu bentuk anarki. GAM di Aceh telah menunjukkan potensi ancaman bersenjata dan berbagai bentrokan serta pembunuhan telah sering terjadi baik terhadap penduduk sipil maupun terhadap aparat keamanan. Di Irian Jaya, beberapa tokoh telah memobilisasi pendukungnya untuk melaksanakan Kongres Rakyat Papua (KRP) dalam upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun mereka menyatakan tidak akan melakukan perjuangan bersenjata, namun dalam beberapa peristiwa telah terjadi penyerangan dengan korban luka dan jiwa baik dari kalangan penduduk sipil maupun aparat keamanan.

Faktor-faktor Penyebab

Faktor Politik.

Memang tidak ada faktortunggal sebagai penyebab konflik-konflik tersebut. Tetapi penyebab utama dari semua kerusuhan yang melanda di berbagai daerah sejak lahirnya Orde Reformasi dua tahun lalu adalah faktor politik yaitu tidak adanya

hanya terdapat sedikit parpol malahan hanya ada dua parpol besar atau di beberapa negara Asia hanya ada satu parpol dominan.

Lain dari itu, elite politik dan massa saat ini terpecah-pecah kedalam berbagai aliran politik, ideologi serta kepentingan pribadi dan kelompok yang sangat sulit untuk dipersatukan. Gerakan reformasi telah menciptakan suatu sistem politik yang multipartai dan hal ini membawa konsekuensi meningkatnya ketegangan antar pendukung parpol. Hal ini bisa dilihat misalnya ketika pendukung PDIP di Bali dan Jakarta mengamuk begitu mendengar kekalahan Megawati dalam pemilihan Presiden di SU.MPR 1999. Di Surabaya, walaupun tidak membawa korban jiwa tetapi sikap anarki telah ditunjukkan oleh pendukung parpol tertentu terhadap suraikabar yang dianggap telah memberitakan hal-hal yang merugikan tokoh partainya.

Penyebab timbulnya gerakan separatisme di Aceh dan Irian Jaya adalah kombinasi antara rasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat serta aktivitas dari segelintir tokoh lokal yang tidak terlampung dalam birokrasi lokal serta masih adanya elemen yang merupakan warisan penjajah. Birokrasi sipil, polisi dan tentara juga bukanlah entitas yang bersatu karena selain ada friksi diantara tiga kekuatan tersebut, masing-masing mereka juga terdiri dari berbagai fraksi internal yang bersaing satu sama lain secara terbuka maupun tertutup. Kekuatan-kekuatan politik dan birokrasi sipil-militer yang terpecah-pecah tersebut sukar untuk dipersatukan tanpa adanya kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa.

UU Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pemerintahan di Daerah tampaknya ikut menjadi penyebab situasi yang tidak kondusif dewasa ini. UU tersebut memang berhasil

Tampaknya Tuhan juga memberi cobaan kepada kita dengan tidak memberi kita pemimpin yang disegani. Semua elite merasa setara sehingga tidak seorangpun memiliki wibawa yang mencukupi untuk mengatur yang lain. Lebih dari itu, semua tokoh tidak seorangpun yang bisa dipercayai kata-katanya.

pemimpin yang disegani yang menyebabkan lemahnya pemerintah pusat. Sebagai bangsa yang heterogen kita membutuhkan seorang pemimpin yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak mempraktekkan KKN dan berwibawa dalam arti diikuti kata-kata dan arahnya oleh bawahannya dan oleh rakyat. Tapi tampaknya Tuhan juga memberi cobaan kepada kita dengan tidak memberi kita pemimpin yang disegani. Semua elite merasa setara sehingga tidak seorangpun memiliki wibawa yang mencukupi untuk mengatur yang lain. Lebih dari itu, semua tokoh tidak seorangpun yang bisa dipercayai kata-katanya. Yang juga menyedihkan adalah karena para elite ini tidak mau belajar dari sejarah, padahal kita pernah hampir porak poranda akibat dari heterogenitas parta politik di tahun limapuluhan. Mereka tidak mau mengamati bahwa di negara-negara lain yang maju



causing all these conflicts. But the main cause of all the riots sweeping various areas since the birth of the Reform Order two years ago is the political factor that there is no admired leader, which causes weakness of the central government. As a heterogeneous nation we need a leader who is clean and authoritative. Clean means not involved in corruption, collusion and nepotism while authoritative means that his words and directions are followed by his subordinates and by the people. But God seems to be testing us by not giving a leader who is admired. All elites think themselves equal so that there is no one who has enough authority to control the others. Moreover, not one leader's words can



Still have the potential threaten

be trusted. What is also sad is that this elite does not want to learn from history, although we were in a mess in the 1950s because of the heterogeneity of the political parties. They do not want to realise that in other developed countries there are only a few political parties or just two, or in some Asian countries only one dominant party.

Besides this, the political elite and the masses at his moment are broken into various political currents, ideologies and private interests that cannot easily be united. The reform movement has created a multiparty political system and this has had the consequence of increasing tension between supporters of the different parties. This could clearly be seen when for example PDI-P supporters in Bali and Jakarta ran amok on hearing of the defeat of Megawati in the 1999

presidential election at the MPR general session. In Surabaya, although there were no deaths, anarchy was shown by supporters of a certain political party against a newspaper which they thought defamed a leader of their party.

The cause of the rise of the separatist movement in Aceh and Irian Jaya is a combination of a feeling of being unjustly treated by the central government and activity by a number of local leaders who have not been fitted into the local bureaucracy, while there are still elements which represent an inheritance from the colonialists. The civil bureaucracy, the police and the military are not a united entity as there is friction between these three entities as well as internal factions challenging each other overtly or covertly. The political powers and the civilian military

bureaucracy divided in this way cannot easily be united without strong and authoritative national leadership.

Law no.5 of 1974 on Local Government has seemingly also caused the current unfavourable situation. This law has succeeded in uniting the regions in obeying the centre but has meant that people in the regions no longer have informal leaders who they respect. Thus there is no power which can unite the people as a single community in an area, leaving them readily susceptible to outside provocation. The people are easily provoked into brutal acts because they no longer have leaders they respect. Before we had village chiefs,

ulamas, community leaders and various informal leaders at the village level whom we respected.

But now, although they still exist, their authority has greatly lessened because their power, under the above law, was taken over by the central government through the regional organs of central government. Political laws have also ended the authority of leaders of people's organisations which before the New Order were effective agents of unity in their organisations and in case of conflicts between social groups were easily able to communicate and calm down their followers. But when these leaders no longer had authority, there were conflicts of one mass against another which were hard to pacify. So it is time for the government to revive traditional leadership institutions so that peace can be looked after in the



mempersatukan daerah untuk tunduk kepada Pusat tetapi akibatnya rakyat di daerah tidak lagi memiliki pemimpin informal yang disegani. Karena itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mempersatukan rakyat sebagai kesatuan komunitas di daerah sehingga mereka menjadi sangat rawan terhadap provokasi dari luar. Rakyat mudah dipancing untuk melakukan kebrutalan karena tidak lagi memiliki pemimpin yang mereka segani. Dulu kita masih memiliki kepala desa, ulama, ajengan, dan berbagai sebutan pemimpin informal lainnya di tingkat desa yang kita segani.

Tapi sekarang, walaupun mereka masih ada, wibawa mereka sudah sangat berkurang karena kekuasaan mereka, melalui UU tersebut, telah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui organ-organ Pusat di daerah. UU bidang politik pun telah menyebabkan habisnya kewibawaan para pemimpin ormas yang di masa sebelum Orba pernah secara efektif menjadi agen pemersatu anggota ormasnya dan apabila terjadi konflik antar golongan dengan mudah para tokoh itu akan saling berhubungan dan menenangkan massanya. Tapi ketika para pemimpin ini tidak punya kewibawaan lagi, yang berhadapan adalah massa dengan massa yang sukar sekali untuk didamaikan. Jadi, sudah sepatutnya apabila pemerintah menghidupkan lagi lembaga-lembaga kepemimpinan tradisional tersebut agar kedamaian dalam kehidupan komunitas dapat terjaga dengan baik.

Kesulitan untuk menjaga kedamaian diperparah oleh upaya untuk menghilangkan wibawa aparat keamanan yang sejak awal reformasi selalu dihujat dan disalahkan. Memang kita tahu bahwa tentara dan polisi yang berpolitik telah menimbulkan eksekusi negatif, tetapi aparat keamanan yang mengalami demoralisasi juga mempersulit terciptanya rasa aman dan perdamaian karena timbul rasa takut disalahkan di kalangan aparat sehingga mereka enggan menangani konflik. Sebab itu, kita setuju apabila tentara dan polisi tidak ikut bermain namun

wibawa mereka harus dijaga dan kehadiran tentara di tingkat lokal tetap dipertahankan karena polisi dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk menjaga sendiri keamanan wilayahnya.

Faktor-faktor sosial-ekonomi

Ada pula faktor-faktor lain yang merupakan kombinasi antara faktor-faktor sosial-ekonomi dan faktor-faktor politik pada beberapa kasus kerusuhan sosial dan anarki. Kerusuhan anti Cina yang terjadi di bulan Mei 1998 merupakan hal yang bersifat laten dan terjadi secara berkala meskipun sporadis sejak datangnya orang Cina ke Indonesia di jaman penjajahan dahulu. Hal itu terjadi sebagai campuran antara irihati dengan frustrasi di kalangan pribumi terhadap WNI keturunan Cina. Irihati dan frustrasi muncul karena di jaman penjajahan orang-orang keturunan Cina diberi strata sosial lebih tinggi daripada inlander dan di jaman kemerdekaan hingga saat ini mereka dianggap sebagai kelompok yang lebih kaya daripada pribumi.

Pembunuhan "tukang santet" di Banyuwangi dan Jember tampaknya memiliki kaitan dengan rasa tidak berdaya masyarakat yang kemudian menumbuhkan dendam dari keluarga korban santet. Mereka tidak berdaya untuk membalas melalui santet juga atas kematian keluarganya, sementara aparat kepolisian sudah tentu hanya mampu menindak hal-hal yang bersifat fisik, bukan metafisik karena sulit untuk dibuktikan. Namun ada pula yang mencurigai adanya upaya kaum komunis baru di balik peristiwa tersebut. Ini mengingat korbanannya adalah kaum agamawan yang merupakan tokoh-tokoh utama pengganyangan kaum komunis dalam Peristiwa G-30-S/PKI. Unsur-unsur komunis baru ditengarai pula dalam kerusuhan yang mengiringi aksi unjuk rasa sejak Peristiwa 27 Juli hingga pembakaran kendaraan militer dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Salemba baru-baru ini. Namun kecurigaan seperti ini masih harus dikaji dan diselidiki lebih dalam lagi.

Pertikaian antar suku di Sanggau-Ledo dan Sambas disebabkan antara lain oleh irihati atas sukses ekonomi perantau Madura yang kemudian tersulut oleh perilaku kurang sopan beberapa orang Madura. Sedangkan faktor penyebab terjadinya kerusuhan bermotif SARA di Maluku dan Poso antara lain adalah pertikaian antar elite lokal yang memperebutkan jabatan birokrasi di pemerintahan daerah (bupati). Pihak yang kalah dalam proses pemilihan bupati kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memprovokasi pendukungnya yang kebetulan berbeda agama dengan pendukung pihak yang terpilih. Namun faktor murni adanya pertentangan agama dalam tragedi Maluku dan Ambon tetap harus diperhatikan. Lain dari itu ada media massa tertentu yang menulis bahwa di balik kerusuhan tersebut ada oknum-oknum RMS (Republik Maluku Selatan) yang didukung Belanda yang ikut terlibat. Keterlibatan unsur asing ini juga ditengarai ada di Irian Jaya. Tetapi konflik SARA di Situbondo yaitu perusakan beberapa gereja tampaknya dipicu oleh kekesalan masyarakat Muslim terhadap pihak non-Muslim yang mendirikan gereja dalam jumlah banyak di tengah masyarakat Islam. Hal ini dianggap oleh orang Islam di sana sebagai upaya terselubung untuk melakukan kristenisasi orang Islam.

Sebab-sebab lain

Selain sebab-sebab politik dan sosial-ekonomi yang telah disebutkan di atas eskalasi kerusuhan dan anarki tampaknya diperparah oleh tidak adanya kepastian dan penegakan hukum serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya hal ini merupakan gejala lama ketika elite politik dan elite pemerintahan sejak dulu telah sering tidak mengabaikan ketentuan hukum demi kepentingan diri dan kelompoknya serta melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil terutama di beberapa daerah yang kaya sumber alam. Pelanggaran hukum oleh para elite ini tampak



life of the community.

The problem of keeping peace has been worsened by attempts to eliminate the authority of the security apparatus which from the start of reform have been insulted and rebuked. We know indeed that troops and police in politics have brought up negative excesses, but the security apparatus, which has been demoralised, has also had trouble creating peace and security because of fear of criticism so that they are unable to handle conflicts. Thus, we agree if troops and police do not play politics but their authority must be preserved and the presence of troops at local levels must be maintained because police and people do not yet have the ability to maintain alone the security of their area.

Socioeconomic factors.

There are also other factors which are a combination of socio economic factors and political factors in some cases of social riots and anarchy. The anti-Chinese riots of May 1998 were a latent fact which happened occasionally albeit sporadically from the first arrivals of Chinese people in Indonesia during the colonial period. This was due to a mix of envy and frustration among natives about Indonesians of Chinese descent. Envy and frustration arose because in colonial times people of Chinese descent were given a higher social stratum than *inlanders* and in the independence period up to now they have been seen as a richer group than *pribumis* (Indonesians of local descent).

The killings of dukun santet in Banyuwangi and Jember seem to have arisen from a feeling of hopelessness among people who sought vengeance as victims of the sorcerers. They felt too weak to seek redress from the sorcerers for the death of family members while the police of course could only prosecute crimes of a physical nature not hard to prove metaphysical crimes. But there are also those who suspect a

The cause of the rise of the separatist movement in Aceh and Irian Jaya is a combination of a feeling of being unjustly treated by the central government and activity by a number of local leaders who have not been fitted into the local bureaucracy, while there are still elements which represent an inheritance from the colonialists.

new communist effort behind these events. They recall that the victims were religious leaders who had been the main leaders of the crushing of the communists after the G-30S/PKJ uprising. New communists were indicated in the riots which accompanied demonstrations from the 27th July incident to the burning of military vehicles by students recently in Salemba. However, these suspicions need further and deeper research and investigation.

Conflicts between tribes in Sanggau-Ledo and Sambas were caused by the economic success of Madurese migrants which was later aggravated by the impolite behaviour of a few Madurese. Factors behind the SARA riots in Poso and Maluku were conflicts among the local elite to obtain bureaucratic positions in local government. The losing party in the election of regent later gave vent to his disappointment by provoking his supporters, who were of a different religion than the chosen candidate. But the pure fact of conflicts between religions in the Maluku and Ambon tragedy must be attended to. Different again is the version of some mass media that there are certain members of the South Maluku Republic (RMS), supported by Holland, which was also involved. The involvement of foreign elements was also signalled in Irian Jaya. But the SARA conflict in Situbondo involving the destruction of churches was apparently triggered

by the disappointment of Muslims with non-Muslims who built churches in large numbers among the Muslim people. This was seen by Muslims there as a disguised attempt to Christianise Muslims.

Other causes

Besides the political and socioeconomic causes cited above, the escalation of violence and anarchy was also made worse by lack of legal certainty and injustice felt by the people. In fact this was a long time habit of the political elite which set aside the law for the interests of themselves and their groups and carried out activities leading to a sense of injustice, especially in areas rich in natural resources. These permitted infractions by the elite led to frustration among the people, which eventually turned into a lack of trust in legal institutions. Together with this a special political position was enjoyed by the military, the police and the bureaucracy, building an arrogant attitude among them toward the public. But these unjustly treated people also saw the apparatus practise large and small scale corruption while the people, especially the little people, always lived in suffering and insecurity.

When the opportunity came to express this frustration through revenge against the apparatus arrived, the people enthusiastically took advantage of it. This opportunity arrived with the change of government which brought an accumulation of political, social and economic problems. The new government established turned out to be lacking in strength and authority. The people felt they had the chance to do whatever they wanted without fear of the law. In fact, the government had neither the ability nor the courage to uphold the law. Together with this these frustrated people also felt they could abuse the police, the military, the judges and prosecutors, who they saw as representatives of the arrogant and unjust regime. This abuse, as written above, led to demoralisation among the security



dibiarkan sehingga menimbulkan frustrasi masyarakat dan lama kelamaan berubah menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Bersamaan dengan itu posisi istimewa dalam bidang politik yang dinikmati oleh aparat militer, polisi dan aparat sipil telah menumbuhkan sikap arogansi mereka terhadap politik. Padahal rakyat yang telah diperlakukan tidak adil itu, juga menyaksikan bahwa aparat tersebut melakukan korupsi baik besar maupun kecil sementara rakyat, terutama yang kecil, selalu hidup dalam kesengsaraan dan ketidak-amanan.

Ketika kesempatan untuk melampiaskan semua frustrasi dan "dendam" terhadap aparat itu pun tiba, maka masyarakat dengan antusias memanfaatkan kesempatan tersebut. Kesempatan itu tiba ketika terjadi pergantian pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya akumulasi persoalan politik, sosial dan ekonomi. Pemerintahan baru yang terbentuk ternyata bukan pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Akibatnya masyarakat merasa memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada rasa "takut" terhadap hukum. Dalam kenyataannya, pemerintah memang tidak memiliki kemampuan bahkan mungkin tidak mempunyai keberanian untuk menerapkan ketentuan hukum. Bersamaan dengan itu rakyat yang frustrasi tadi juga merasa memiliki kesempatan untuk menghujat tentara, polisi, hukum dan jaksa yang dianggapnya sebagai representasi dari kekuasaan yang congkak dan tidak adil. Hujatan-hujatan tersebut, seperti ditulis di atas, telah menimbulkan demoralisasi di kalangan aparat keamanan dan penegak hukum sehingga mereka tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan sewajarnya. Mereka juga kehilangan keyakinan untuk bertindak terhadap pelanggaran hukum karena mereka khawatir bahwa tindakan mereka akan dianggap melanggar hak asasi manusia. Lemahnya pemerintah pusat ini dimanfaatkan juga oleh unsur-unsur separatis di beberapa

Belum ada upaya yang sungguh-sungguh untuk secara sistematis mencegah ancaman integrasi bangsa.

daerah untuk "menantang" pemerintah pusat.

Di bidang pendidikan, kita menghadapi dua hal. **Pertama**, tampaknya upaya menanamkan nasionalisme dilakukan dengan semakin kurang intensif. Pelajaran sejarah dan pengenalan terhadap suku, daerah, dan agama lain dilakukan melalui hafalan bukan dengan simulasi atau anjingsana. Anak didik, sebagai akibatnya, hanya mengetahui lingkup sempit daerah, suku dan agamanya sehingga kurang mampu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka. **Kedua**, adalah gejala munculnya diskriminasi dan eksklusivisme. Diskriminasi di bidang pendidikan bukan hanya menimpa ras tertentu tetapi juga atas dasar suku. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa WNI keturunan Cina sukar untuk diterima di PTN, dan universitas di daerah tertentu sukar menerima suku lain untuk menjadi pimpinannya. Eksklusivisme pendidikan bisa dilihat dari tumbuhnya sekolah dan perguruan tinggi unggulan yang mahal dan celaknya pertumbuhan itu tidak dibarengi oleh pemberian beasiswa, karena itu, anak miskin yang cerdas tidak akan mungkin memasuki sekolah dan PT unggulan tersebut. Lain dari itu tayangan film sinetron dan penerbitan buku cerita anak-anak belum mencantumkan issue pembauran ini secara terarah.

Konflik sosial juga mudah pecah karena pemerintah tidak secara sungguh-sungguh mengelola pembauran. Di bidang perumahan, meskipun undang-undang perumahan telah memberi ketentuan yang jelas dalam peruntukan bagi semua strata ekonomi, tapi dalam praktek peruntukan itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya banyak pemu-

kiman yang secara eksklusif dihuni oleh satu golongan etnik dan strata sosial tertentu saja.

Kesimpulan

Makalah ini mencoba memberikan ilustrasi mengenai beberapa konflik sosial di Jakarta dan di beberapa daerah sejak beralihnya kekuasaan dari Orde Baru ke pemerintahan Presiden Habibie dan Presiden Abdurachman Wachid yang dalam beberapa kasus mengarah keperbuatan anarki serta upaya beberapa tokoh Aceh dan Irian Jaya untuk memerdekakan daerahnya. Konflik-konflik dan gerak separatis tersebut, meskipun sementara ini bisa diredam namun tetap potensial sebagai ancaman terhadap integrasi bangsa.

Sebab utama dari semua itu tampaknya terletak pada faktor politik yaitu lemahnya kepemimpinan nasional dan lemahnya pemerintah pusat akibat dari adanya fragmentasi elite di tingkat nasional yang berdampak pada friksi politik di tingkat massa. Bersamaan dengan itu penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selain politisi sibuk dengan masalah politik, aparat keamanan menghadapi hujatan yang menyebabkan mereka mengalami demoralisasi sehingga tidak memiliki keyakinan diri dan memiliki rasa enggan untuk menegakkan hukum.

Di tingkat lokal, konflik-konflik tersebut dipacu pula campuran faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik seperti rasa irihati dan frustrasi dalam persaingan ekonomi, perebutan jabatan birokrasi lokal, dan mobilitas sosial yang menumbuhkan kesadaran beragama dan kesadaran etnik. Bersamaan dengan itu, terlihat pula kenyataan bahwa pemerintah kurang sungguh-sungguh membina pembauran antar golongan. Masih berjalan tanpa restriksi diskriminasi di bidang pendidikan dan perumahan dan masih dibiarkan berkembangnya eksklusivisme di bidang pendidikan dan perumahan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa belum ada upaya yang sungguh-sungguh untuk secara sistematis mencegah ancaman integrasi bangsa.



apparatus and law enforcers so that they were unable to do their duty naturally. They lost the firmness to act against lawbreakers as they worried that their actions would be seen as human rights violations. The weakness of the central government was exploited by separatist groups in some areas to challenge the government.

In education, we face two problems. First, attempts to sow nationalism have lost their intensity. Students of history and knowledge of other tribes, regions and religions learn by memorization rather than by simulation or visits. Educated children, consequently, have only a narrow understanding of regions, tribes and religions so that they are short of tolerance toward other people who are different to them. Second, there has been a habit of discrimination and exclusivism. Discrimination in education affects not only a certain race but also some tribes. It is public knowledge that children of Chinese descent are virtually unable to enter the state higher education system

(PTN-perguruan tinggi negara), while universities in certain areas hardly ever accept members of other ethnic groups as their leaders. The exclusivism of education can be seen from the growth of schools and higher education institutes with high performance and fees, which unfortunately are not accompanied by a growth in scholarships. Thus, poor children who are clever will not be able to enter these top schools and higher education institutes. In addition, film, television serials and children's story books are not yet oriented to deal with this issue of mixing.

Social conflicts break out easily because the government fails to control mixing. In housing, although there is a clear law regulating supply for all social and economic levels, in practice this allocation is left to the market. Consequently, many settlements are occupied exclusively by one ethnic or social group only.

Conclusion

This is an attempt to illustrate some of the social conflicts in Jakarta and other areas since the transfer of power from the New Order to the governments of President Habibie and President Abdurrahman Wahid, which in some cases have tended to anarchy and the attempt of Acehnese and Irianese leaders to separate from Indonesia. These conflicts and separatist movements, although they can be subdued, still have the potential to threaten the nation's integration.

The main cause of this is the weakness of the national leadership central government because of the fragmentation of the national political elite causing friction at the level of the masses. Together with this law enforcement is not carried out as it should be because while politicians are busy with political problems, the security apparatus faces abuse which causes them to experience demoralisation so that they do not have the certainty and determination to enforce the law.

At the local level, these conflicts are also caused by the involvement of social, economic and political factors such as jealousy and frustration in economic competition, competition for bureaucratic positions, and social mobility with its ethnic and religious awareness. Together with this, it is also seen that the government lacks sincerity in mixing groups. There is unrestricted discrimination in education and housing and exclusivism is allowed to grow in education and housing. Thus, it can be concluded that there is not yet a sincere effort to prevent systematically the threats to national integration.



Kompas